



## SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

**MEDIA : Siwalima**

**Siwalima, 20 September 2018**

**Hasil Temuan BPK**

### **Istri Walikota Masuk Daftar SPPD Fiktif**

**Ambon** - Keterlibatan istri Walikota Ambon, Ny Leberina Louhenapessy, dalam kasus SPPD fiktif, ternyata bukan ilusi apalagi khayalan. Nama Debby, panggilan akrabnya, terbukti masuk dalam kasus yang dibidik polisi itu. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku, nama Debby masuk dalam daftar penggunaan SPPD fiktif tahun 2011.

Sesuai agenda istri orang nomor satu di Pemkot Ambon ini harusnya diperiksa Jumat (21/9), namun setelah dikordinasikan ia masih berada di Jakarta, sehingga diundur ke Senin (24/9).

"Masih di Jakarta, maka nanti pemeriksaan Senin depan," kata Paur Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Yahya M Leinussa kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (19/9).

Debby bukanlah seorang PNS atau ASN. Namun namanya tercantum menggunakan SPPD tahun 2011 dalam kegiatan bersama walikota di Jakarta.

"Ibu Debby akan diperiksa sebagai saksi karena diketahui menggunakan sebagian anggaran SPPD fiktif Pemkot Ambon tahun 2011. Panggilan sudah dikirim penyidik Satreskrim kepada ibu Debby, namun yang bersangkutan masih berada di Jakarta, sehingga pemeriksaan ibu Debby akan dilalukan pada pekan depan," jelas Leinussa.

#### **Siap Diperiksa**

Istri Walikota Ambon Ny. Debby Louhenapessy siap memenuhi panggilan penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk diperiksa terkait dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2011.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy yang dikonfirmasi *Siwalima* di Balai Kota Ambon, Rabu (19/9), mengaku, sudah menerima surat panggilan pada Senin (17/9).

"Saya sudah terima suratnya kemarin Senin, diterima langsung oleh ajudan saya di rumah dinas, sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Yang jelas ibu siap diperiksa," kata Louhenapessy, sembari menambahkan, istrinya akan diperiksa pada Senin (24/9).

Sebelumnya, penyidik memanggil istri walikota untuk diperiksa pada, Rabu (12/9) lalu. Namun ia mangkir.

Selain istri walikota, penyidik juga memanggil lima orang lainnya, yaitu mantan kabag hukum yang saat ini menjabat Sekretaris DPRD Kota Ambon Elkiopas Silooy, mantan Kadis Perhubungan Kota Ambon Morits Lantu. Lantu saat ini sementara menjalani hukuman di Lapas Klas II Ambon dalam kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012. Kemudian tiga lainnya adalah Yohana Sopacua, Yosep Lilipory dan Adonia Maail. Namun mereka mangkir.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy pada sejumlah media mengatakan, istrinya tidak memenuhi panggilan penyidik, karena surat panggilan salah alamat. Dalam surat itu, tertera nama D. Louhenapessy, berjenis kelamin laki-laki.

Namun pihak penyidik Polres Ambon menjelaskan, kalau itu hanya kesalahan pengetikan. Penyidik memastikan yang dipanggil adalah istri walikota.

#### **Periksa Maskapai**

Sebelumnya tim penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi dari maskapai Garuda Indonesia Airlines dan Sriwijaya Air di Jakarta.

"Dua maskapai juga telah diperiksa saat tim ke Jakarta. Harusnya tiga maskapai, tetapi karena Batavia sudah pailit, sehingga yang dipe-riksa hanya dua maskapai saja," jelas Leinussa.

Namun Leinussa enggan menjelaskan soal hasil pemeriksaan, dengan alasan sudah masuk ke materi penyidikan. "Penyidik tidak akan main-main, dan semua tahapan proses masih terus berjalan," ujarnya.

#### **Naik Penyidikan**



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

### **MEDIA : Siwalima**

Penanganan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Pemkot Ambon tahun 2011 naik status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kasus yang diduga merugikan negara Rp 742 juta lebih ini, dinaikan ke tahap penyidikan, setelah tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease melakukan gelar perkara di Kantor Dit-reskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua Ambon, Jumat (8/6).

Dalam gelar perkara itu, tim penyidik tipikor Satreskrim memaparkan, hasil penyelidikan dan bukti-bukti adanya dugaan korupsi dalam SPPD fiktif tahun 2011 di Pemkot Ambon.

Bahkan, siapa saja bertanggung jawab dalam kasus ini juga sudah dikantongi tim penyidik. "Bukti-buktinya kuat, makanya naik penyidikan. Siapa yang bertanggung jawab sudah terungkap. Jadi ikuti saja ya, langkah selanjutnya," kata sumber di Polres Pulau Ambon.

Seperti diberitakan, anggaran sebesar Rp 2 milyar dialokasikan untuk perjalanan dinas di lingkup Pemkot Ambon. Dalam pertanggungjawaban disebutkan anggaran itu, habis terpakai. Namun tim penyidik menemukan 100 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp 742 juta lebih.

Sekot AG Latuheru, adalah pejabat yang paling bertanggung jawab. Tim penyidik masih terus menggali peran Latuheru, dan pihak lainnya dalam kasus ini. Sebab, yang namanya perjalanan dinas, harus berdasarkan persetujuan Latuheru sebagai sekot.

Latuheru sebelumnya diperiksa selama delapan jam lebih oleh tim penyidik, Rabu (16/5) lalu. Ia dicecar selama 23 pertanyaan. **(S-27)**